



PEMERINTAH KOTA JAMBI

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2024 ini merupakan rencana yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana kerja (Renja) ini merupakan dokumen perencanaan yang wajib disusun OPD guna mendukung kelangsungan tugas pokok dan fungsi sehari-hari. Dimana penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan amanat Undang-undang Dasar 1945, dimana dengan melaksanakan fungsi penyusunan dokumen berarti OPD telah menjalankan tugas mereka sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang menjalankan fungsi otonomnya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi merupakan OPD teknis dari Pemerintah Kota Jambi yang terlebih dahulu wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebelum pelaksanaan anggaran dimulai, dimana dokumen ini biasa disebut dengan Renja Tahunan OPD yang berguna untuk menjamin pelaksanaan kegiatan OPD selama satu tahun anggaran yaitu tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa apa yang kami tuangkan dalam Dokumen ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, saran dan masukan yang sifatnya untuk perbaikan atas isi dokumen ini akan sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan tangan terbuka.

Akhir kata, semoga dokumen yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat untuk semua pihak. dan taklupa pula ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Renja OPD ini.

Jambi, Mei 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA JAMBI**



MAHRUZAR,ST
Pembina Tk.I

NIP. 19780127 200501 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi	3
1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi	25
2.2. Analisis Kinerja Penerimaan OPD.....	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	27
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN.....	43
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPRKP KOTA JAMBI	49
BAB V PENUTUP	65



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi14

Tabel 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 26

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi28

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jambi41

Tabel 3.1. Prioritas dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman46

Tabel 3.2. Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....47

Tabel 3.3. Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....47

Tabel 3.4. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman48

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, yang merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; dan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja OPD sebagai penjabaran Renstra OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kota Jambi ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Dinas secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

Proses penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah semakin penting peranannya dikaitkan dengan pemendagri No. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi JPD dan JMD, serta tata cara pembukuan didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang



rancangan RKPD dan Renja OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Jambi.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 juga disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga ada perbedaan mengenai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi tahun 2022.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara, Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kota Jambi, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan dengan kondisi di lapangan yang akan dikerjakan pada tahun anggaran berikutnya. Tujuan penyusunan renja lainnya adalah mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Penerimaan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Kota Jambi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi Tahun Lalu juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi Tahun Lalu meliputi 3 (tiga) hal yaitu : (1) **kebijakan** perencanaan program dan kegiatan, (2) **pelaksanaan** rencana program dan kegiatan, (3) **hasil** rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2025, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun lalu sebagai bahan dalam Penyusunan Perencanaan Tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi pada tahun Anggaran 2023 melaksanakan 2 (Dua) Urusan pemerintah yaitu urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan 4 (empat) program, dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sbb:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp40.226.507, Realisasi belanja sebesar Rp29.764.524 dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, bahan komputer, kertas dan cover, bahan cetak, alat listrik, jasa tenaga administrasi, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota. Realisasi Keuangan 74%

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp22.993.050, Realisasi belanja sebesar Rp22.818.504 dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, bahan cetak, bahan komputer, jasa tenaga administrasi dan iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN. Realisasi Keuangan 99%

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.588.356, Realisasi belanja sebesar Rp1.443.960 dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, dan bahan komputer. Realisasi Keuangan 91%

4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp2.795.650, Realisasi belanja sebesar Rp2.541.500 dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, dan bahan komputer. Realisasi Keuangan 91%

5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.612.600, Realisasi belanja sebesar Rp1.466.000 dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, dan bahan komputer. Realisasi Keuangan 91%

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp2.211.715, Realisasi belanja sebesar Rp2.010.650 dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, dan bahan cetak. Realisasi Keuangan 91%

7. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp31.708.992, Realisasi belanja sebesar Rp29.788.874 dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, honorarium pengelola website, jasa tenaga administrasi dan iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN. Realisasi Keuangan 94%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan :



1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp4.771.012.858, Realisasi belanja sebesar Rp3.916.396.152 dengan keluaran berupa belanja gaji pokok ASN, tunjangan keluarga ASN, tunjangan jabatan ASN, tunjangan fungsional umum ASN, tunjangan beras ASN, tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS, iuran jaminan kesehatan ASN, iuran jaminan kecelakaan kerja ASN, iuran jaminan kematian ASN, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN, belanja insentif ASN. Realisasi Keuangan 82%

2. Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp371.241.974, Realisasi belanja sebesar Rp341.470.894 dengan keluaran berupa belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan, Bahan Cetak, Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Operator Komputer, serta Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN. Realisasi Keuangan 92%

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp7.642.339, Realisasi belanja sebesar Rp6.988.490 dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, serta perjalanan dinas dalam kota. Realisasi Keuangan 91%.

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp38.292.845, Realisasi belanja sebesar Rp27.125.504 dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, jasa tenaga administrasi, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota. Realisasi Keuangan 71%.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp39.900.000, Realisasi belanja sebesar Rp26.334.000 dengan keluaran berupa belanja Pakaian Batik Tradisional. Realisasi Keuangan 66%

2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp55.318.800, Realisasi belanja sebesar Rp55.286.154 dengan keluaran berupa belanja Bahan Bakar dan



Pelumas, Jasa pelayanan kearsipan, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, Bimbingan teknis, serta Perjalanan dinas dalam kota. Realisasi Keuangan 100%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp4.296.600, Realisasi belanja sebesar Rp3.873.000 dengan keluaran berupa belanja bahan komputer dan alat listrik. Realisasi Keuangan 90%
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp163.840.397, Realisasi belanja sebesar Rp151.944.075 dengan keluaran berupa belanja bahan bangunan dan konstruksi, alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, materai, bahan komputer, Parabot kantor, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan, iuran jaminan kerja bagi non ASN. Realisasi Keuangan 93%
3. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp16.249.838, Realisasi belanja sebesar Rp16.249.838 dengan keluaran berupa belanja bahan cetak dan materai. Realisasi Keuangan 100%
4. Fasilitas Kunjungan Tamu
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp33.059.800, Realisasi belanja sebesar Rp33.044.554 dengan keluaran berupa belanja materai, makan dan minum rapat, jasa tenaga administrasi, serta iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN. Realisasi Keuangan 100%
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp168.788.650, Realisasi belanja sebesar Rp34.966.064 dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, materai. Bahan komputer, jasa pelayanan kearsipan, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, perjalanan dinas biasa. Realisasi Keuangan 21%.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Meubel
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp28.369.000, Realisasi belanja sebesar Rp28.248.000 dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor,



kertas dan cover, bahan cetak, serta belanja meubel. Realisasi Keuangan 100%.

2. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp15.000.000, Realisasi belanja sebesar Rp14.991.900 dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, materai, serta mesin absen. Realisasi Keuangan 100%.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp3.000.000, Realisasi belanja sebesar Rp3.000.000 dengan keluaran berupa belanja materai. Realisasi Keuangan 100%.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp248.324.169, Realisasi belanja sebesar Rp188.972.221 dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer, jasa tenaga administrasi, tagihan telepon, tagihan air, tagihan listrik, internet/tv berlangganan, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN serta belanja peralatan jaringan. Realisasi Keuangan 76%.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp366.929.600, Realisasi belanja sebesar Rp355.324.616 dengan keluaran berupa belanja bahan bakar dan pelumas, suku cadang alat angkutan, alat tulis kantor, kertas dan cover, materai, bahan komputer, jasa tenaga administrasi, pembayaran pajak, bea, dan perizinan serta iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, Realisasi Keuangan 97%.

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp50.352.800, Realisasi belanja sebesar Rp40.888.938 dengan keluaran berupa belanja jasa tenaga operator komputer, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN, Pemeliharaan alat kantor(alat pendingin) dan pemeliharaan peralatan komputer. Realisasi Keuangan 81%.



2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp322.132.891, Realisasi belanja sebesar Rp242.981.403, Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi, alat tulis kantor, perabot kantor, alat listrik, pakaian kerja bengkel, pipa-pipa plastik, jasa tenaga operator komputer, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, sewa alat rumah tangga lainnya, jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung, pemeliharaan alat pemadam kebakaran, belanja alat bengkel bermesin, belanja gedung dan bangunan, belanja flat/rumah susun. Realisasi keuangan 75%.

2. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp142.590.379, Realisasi belanja sebesar Rp66.993.728 dengan keluaran berupa belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, pakaian dinas harian(PDH), jasa tenaga operator komputer, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan, jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik, tagihan listrik dan iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN . Realisasi Keuangan 47%.

b. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp98.388.906, Realisasi belanja sebesar Rp83.116.364, Dana tersebut digunakan untuk biaya belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, materai, bahan komputer, perabot kantor, belanja makanan dan minuman rapat, jasa tenaga administrasi, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan rekayasa teknik, dan perjalanan dinas. Realisasi Keuangan 84%.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan



Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp169.538.785, Realisasi belanja sebesar Rp152.596.658, Dana tersebut digunakan untuk biaya belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, materai, bahan komputer, perabot kantor, belanja makanan dan minuman rapat, jasa tenaga administrasi, jasa tenaga operator komputer, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan rekayasa teknik, perjalanan dinas, dan belanja modal olar/tugu/tanda lainnya. Realisasi Keuangan 90%.

3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

a. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp80.858.237, Realisasi belanja sebesar Rp78.982.308. Dana tersebut digunakan Belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, jasa tenaga administrasi, jasa pelayanan kearsipan, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, Jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik serta perjalanan dinas. Realisali Keuangan 98%.
2. Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp300.000.000, Realisasi belanja sebesar Rp293.510.000. Dana tersebut digunakan Belanja kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, serta jasa konsultasi perencanaan penata ruang-jasa perencanaan dan perancangan perkotaan. Realisali Keuangan 98%.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp4.511.475, Realisasi belanja sebesar Rp2.767.250. Dana tersebut digunakan Belanja kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, makanan dan minuman rapat, serta perjalanan dinas biasa dan dalam kota. Realisali Keuangan 61%.



b. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp15.291.669, Realisasi belanja sebesar Rp15.098.600, Dana tersebut digunakan Belanja bahan bakar dan pelumas, alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, belanja makanan dan minuman rapat, kursus/pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan. Realisasi Keuangan 99%.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp41.237.033, Realisasi belanja sebesar Rp31.924.000, Dana tersebut digunakan Belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, sewa gedung dan bangunan, serta perjalanan dinas biasa dan dalam kota. Realisasi Keuangan 77%.

c. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp5.323.424.740, Realisasi Belanja sebesar Rp5.275.335.716. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, materai, bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, jasa tenaga administrasi, jasa tenaga ahli, jasa tenaga informasi dan teknologi, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, jasa konsultasi konstruksi, jasa konsultasi pengawasan arsitektur, jasa konsultasi pengawasan penataan ruang, perjalanan dinas biasa dan dalam kota, bantuan sosial, belanja modal tugu/tanda batas lainnya, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi. Realisasi keuangan 99%.

4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :



1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp324.839.059, Realisasi belanja sebesar Rp324.191.277, Dana tersebut digunakan Belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, jasa tenaga administrasi, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, jasa konsultasi konstruksi. Realisasi Keuangan 100%.

2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp28.476.578.757, Realisasi belanja sebesar Rp28.225.388.684, Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan bangunan dan konstruksi, alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak bahan komputer, perabot kantor, alat listrik, belanja makanan dan minuman, pakaian dinas lapangan, pakaian siaga, pakaian olahraga, jasa kantor, jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga supir, jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik, belanja tagihan listrik, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, jasa konsultasi konstruksi, belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman, belanja modal. Realisasi Keuangan 99%.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp763.089.351, Realisasi belanja sebesar Rp650.002.181, Dana tersebut digunakan Belanja alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, perlengkapan dinas, belanja makanan dan minuman rapat, jasa tenaga administrasi, jasa tenaga pelayanan umum, iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN, perjalanan dinas biasa dan dalam kota, belanja bantuan sosial. Realisasi Keuangan 85%.



Tabel 2.1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (out put)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2023								
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11(10/4)							
Urusan Wajib																	
Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
PROGRAM TAHUN 2021-2024																	
1	041	1						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	-	B	B	100%	B	B	100%
1	041	1	2.01					<u>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Peningkatan Nilai AKIP	76	75	80	75,12	94%	75	75	100%



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

1	0 4	1	2.0 1	0 1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7	-	7	7	100%	7	7	100%
1	0 4	1	2.0 1	0 2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	-	1	0	0	#DIV/0!	0	0	0%
1	0 4	1	2.0 1	0 3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPD	-	1	0	0	#DIV/0!	0	0	0%
1	0 4	1	2.0 1	0 4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	-	1	0	0	#DIV/0!	0	0	0%
1	0 4	1	2.0 1	0 5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA- SKPD	-	1	0	0	#DIV/0!	0	0	0%
1	0 4	1	2.0 1	0 6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1	0	0	#DIV/0!	0	0	0%
1	0 4	1	2.0 1	0 7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1	1	1	1	100%	1	1	100%
1	0 4	1	2.0 2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	0 4	1	2.0 2	0 1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	40	35	39	39	100%	39	39	100%
1	0 4	1	2.0 2	0 3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2500	2.500	2500	2769	111%	2500	2500	100%



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

1	0 4	1	2.0 2	0 5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	0	1	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
1	0 4	1	2.0 2	0 7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12	12	12	12	100%	12	12	100%
1	0 4	1	2.0 5				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	0 4	1	2.0 5	0 2			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Batik/Dinas Beserta Perlengkapannya	81	120	78	78	100%	81	81	100%
1	0 4	1	2.0 5	#			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek dan Perjalanan dinas dalam daerah	3	-	4	5	125%	2	2	100%
1	0 4	1	2.0 6				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	0 4	1	2.0 6	0 1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
1	0 4	1	2.0 6	0 2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
1	0 4	1	2.0 6	0 5			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	1	1	100%	1	1	100%



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

1	0 4	1	2.0 6	0 8				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5	5	10	10	100%	5	5	100%
1	0 4	1	2.0 6	0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	9	35	38	109%	30	30	100%
1	0 4	1	2.0 7					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	0 4	1	2.0 7	0 1				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Disediakan	0	-	0	0	#DIV/0!	1	1	100%
1	0 4	1	2.0 7	0 2				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	-	1	1	100%	22	22	100%
1	0 4	1	2.0 7	0 5				Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	25	29	0	0	#DIV/0!	17	17	0%
1	0 4	1	2.0 7	0 6				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan	7	1	22	22	100%	7	7	100%
1	0 4	1	2.0 7	0 7				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1	-	0	0	#DIV/0!	1	1	100%
1	0 4	1	2.0 7	0 9				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	-	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
1	0 4	1	2.0 8					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

										Daerah								
1	04	1	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2750	2.700	2821	2821	100%	2700	2700	100%
1	04	1	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100%	12	12	100%
1	04	1	2.09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	04	1	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	-	33	33	100%	21	21	100%
1	04	1	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89	-	50	50	100%	89	89	100%
1	04	1	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-	1	1	100%	1	1	100%



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

1	0 4	0 3						Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	0,00%	59,92%	61,30%	61,30%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
									Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	76,64%	-	0,00%	0,00%	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%
									Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	35,95%	-	0,00%	0,00%	#DIV/0!	33,97%	33,97%	100%
1	0 4	0 3	2.0 1					Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan permukiman yang memiliki izin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	0 4	0 3	2.0 1	0 1				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	0	592	350	16	5%	0	0	0%



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

1	0 4	0 3	2.0 1	0 3				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1	3	2	3	150%	2	2	100%
1	0 4	0 3	2.0 1	0 2				Penyusunan dan/atau Review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	3	2	2	2	100%	3	3	100%
1	0 4	0 3	2.0 2					Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertata dengan luas dibawah 10 ha	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100%
1	0 4	0 3	2.0 2	0 4				Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	0	2	2	2	100%	0	0	100%
1	0 4	0 3	2.0 2	0 5				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1	6	6	6	100%	5	5	100%



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

1	0 4	0 3	2.0 2	0 8				Penyusunan/Review/Legalisa si Kebijakan Bidang PKP	jumlah review kebijakan PKP yang disusun	0	-	1	1	100%	0	0	100%
1	0 4	0 3	2.0 3					Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
1	0 4	0 3	2.0 3	0 2				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	150	212	28	28	100,00%	74	74	100%
1	0 4	0 4						Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan perumahan yang dilayani utilitas umum	93,50%	75,72%	80,46%	80,46%	100,00%	93,16%	93,16%	100%
1	0 4	0 5	2.0 1					Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase perumahan yang dilayani utilitas umum	93,50%	75,72%	80,46%	80,46%	100,00%	93,16%	93,16%	100%
1	0 4	0 5	2.0 1	0 1				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	2	2	2	2	100,00%	1	1	100%
1	0 4	0 5	2.0 1	0 2				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PJU yang dipelihara	500	500	500	500	100,00%	500	500	100%



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

1	0 4	0 5	2.0 1	0 3				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	10	8	30	30	100,00%	10	10	100%
1	0 4	0 2						Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR	79,67%	-	63,00%	63,29%	100,46%	65,00%	65,00%	100%
1	0 4	0 2	2.0 1					Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen data dan informasi Lokasi Rawan Bencana	2	-	-	-	-	2	2	100%
1	0 4	0 2	2.0 1	0 1				Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	0	-	1	1	100%	0	0	0%
1	0 4	0 2	2.0 1	0 2				Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen data Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	0	-	1	1	100%	0	0	0%
1	0 4	0 2	2.0 3					Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen data dan informasi Lokasi Rawan Bencana	2	-	-	-	-	2	2	100%



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

1	0 4	0 2	2.0 3	0 1				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	umlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	0	-	-	-	100%	10	10	0%
1	0 4	0 2	2.0 5					Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	0 4	0 2	2.0 5	0 1				Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah pengelola rumah susun yang difasilitasi	0	1	0	0	#DIV/0!	0	0	0%
1	0 4	0 2	2.0 5	0 2				Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah rusun yang termanfaatkan	1	1	1	1	100%	1	1	100%
1	0 4	0 2	2.0 6					Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	0 4	0 2	2.0 6	0 1				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	20	35	50	17	34%	40	40	100%



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

1	0 4	0 2	2.0 6	0 3				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5	51	50	55	110%	40	40	100%
1	0 4	0 6						PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Sertifikasi Pengembang Perumahan	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1	0 4	0 6	2.0 1					Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Sertifikasi Pengembang Perumahan	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1	0 4	0 6	2.0 1	0 1				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1	-	-	-	-	-	-	0%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

NO	Indikator IKK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	-	32,9	133,03	135,83	139,24	158,78	133,03	135,83	139,24	158,78	
2	Jumlah unit peningkatan kualitas rumah RTLH	-	710	1232	1680	1704	1804	1232	1707	1735	1804	
3	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	-	40	80	120	160	200	76	102	118	160	



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang disertai dengan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan perumahan seperti jalan jalan lingkungan, parit/drainase dll.
2. Serah terima PSU Perumahan untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup masyarakat.
3. Terlaksananya penanganan kawasan kumuh yang tercantum dalam SK Walikota Jambi.



2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, menetapkan prioritas pembangunan pada Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	17.830.431.482	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	17.830.431.482	
	<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Kota Jambi	Peningkatan Nilai AKIP	76	124.839.264	<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Kota Jambi	Peningkatan Nilai AKIP	76	124.839.264	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	78.266.705	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	78.266.705	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	46.572.559	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Jambi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	46.572.559	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Tertib administrasi keuangan	100%	5.620.731.658	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Jambi	Tertib administrasi keuangan	100%	5.620.731.658	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	5.174.430.616	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	5.174.430.616	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2500 Dokumen	405.672.080	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2500 Dokumen	405.672.080	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	40.628.962	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	40.628.962	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

								anan/Semestera n SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kot a Jam bi	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	84.230.700	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kot a Jam bi	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	84.230.700	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Jam bi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	81 Paket	69.230.700	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Jam bi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	81 Paket	69.230.700	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Jam bi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	3 Orang	15.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kota Jam bi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	3 Orang	15.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kot a Jam bi	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	486.555.931	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kot a Jam bi	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	486.555.931	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.793.034	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.793.034	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.347.048	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Jambi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.347.048	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.638.425	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Jambi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.638.425	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Jambi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	13.049.438	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Jambi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	13.049.438	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	229.727.988	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	229.727.988	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	10.816.831.998	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kota Jambi	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	10.816.831.998	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

						Urusan Pemerintah Daerah					
	Pengadaan Mebel	Kota Jam bi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 unit kursi chitos rapat dan 1 set meja rapat	50.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Jam bi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 unit kursi chitos rapat dan 1 set meja rapat	50.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jam bi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	56.831.998	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jam bi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	56.831.998	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Jam bi	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	I unit gorden ruang rapat bawah	10.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Jam bi	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	I unit gorden ruang rapat bawah	10.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Jam bi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit gedung, perencan aan gedung 700juta, pembang unan gedung 10Milyar	10.700.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Jam bi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit gedung, perencan aan gedung 700juta, pembang unan gedung 10Milyar	10.700.000.000	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	209.411.840	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	209.411.840	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Jambi	Jumlah Surat Menyurat	2.750 Surat	46.892.560	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Jambi	Jumlah Surat Menyurat	2.750 Surat	46.892.560	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	162.519.280	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Jambi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	162.519.280	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	487.830.090	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	487.830.090	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	416.755.680	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kota Jambi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	29 unit	416.755.680	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

						Operasional atau Lapangan		Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 unit	71.074.410	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Jambi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 unit	71.074.410	
2	Program Pengembangan Perumahan	Kota Jambi	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR.	79,67%	726.243.299	Program Pengembangan Perumahan	Kota Jambi	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR.	79,67%	726.243.299	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Progrma Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100,00%	100.000.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Progrma Kabupaten/Kota	Kota Jambi	Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100,00%	100.000.000	
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Tertangani	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	100.000.000	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Tertangani	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	100.000.000	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kot a Jam bi	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100,00%	170.000.000	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kot a Jam bi	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100,00%	170.000.000	
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Jam bi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokume n	170.000.000	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Jam bi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	170.000.000	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kot a Jam bi	Persentase tersusunnya kesepakatan komitmen dengan pengembang/pelaku pembangunan dan pengembangan perumahan	100,00%	456.243.299	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kot a Jam bi	Persentase tersusunnya kesepakatan komitmen dengan pengembang/p elaku pembangunan dan pengembangan perumahan	100,00%	456.243.299	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	96.243.299	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	96.243.299	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5 Laporan	360.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5 Laporan	360.000.000	
3	Program Kawasan Permukiman	Kota Jambi	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	35,95%	8.717.881.474	Program Kawasan Permukiman	Kota Jambi	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	35,95%	8.717.881.474	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kota Jambi	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	100,00%	802.530.910	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kota Jambi	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	100,00%	802.530.910	
	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman danPermukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	3 Dokumen	762.971.460	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman danPermukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	3 Dokumen	762.971.460	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Laporan	39.559.450	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Laporan	39.559.450	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Jambi	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	76,64%	73.265.030	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Jambi	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	76,64%	73.265.030	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	73.265.030	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	73.265.030	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Jambi	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	35,95%	7.842.085.534	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Jambi	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	35,95%	7.842.085.534	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Jambi	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	150 unit	7.842.085.534	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Jambi	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	150 unit	7.842.085.534	
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kota Jambi	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	93,50%	29.979.593.927	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kota Jambi	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	93,50%	29.979.593.927	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Jambi	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	93,50%	29.979.593.927	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Jambi	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	93,50%	29.979.593.927	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	2 Dokumen	279.165.165	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Jambi	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	2 Dokumen	279.165.165	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Jambi	Jumlah Lokasi Pemeliharaan LPJU	1500 Pemasangan Lampu PJU, 1500 Pemeliharaan PJU, 98 Pemeliharaan Makam, 15 Pembangunan Makam dan 2 Lokasi Jalan Lingkungan Perumahan	29.370.897.950	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Jambi	Jumlah Lokasi Pemeliharaan LPJU	1500 Pemasangan Lampu PJU, 1500 Pemeliharaan PJU, 98 Pemeliharaan Makam, 15 Pembangunan Makam dan 2 Lokasi Jalan Lingkungan Perumahan	29.370.897.950	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10 Laporan	308.016.208	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10 Laporan	308.016.208	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Dokumen	21.514.604	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Kota Jambi	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Dokumen	21.514.604	
4	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Jambi	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	10%	25.000.000	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Jambi	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	10%	25.000.000	
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Kota Jambi	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	10%	25.000.000	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan	Kota Jambi	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	10%	25.000.000	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

						Kecil					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Kota Jam bi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Kota Jam bi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	25.000.000	
					57.279.150.182					57.279.150.182	



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

Review Rancangan Awal Renja RKPD Tahun 2023, meliputi aspek :

1. Menyusun ulang Program dan Kegiatan yang ada di Rencana Strategis 2024-2026, disesuaikan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 yang mengatur tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah khususnya untuk Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2. Perumahan dan Permukiman
 - Percepatan serah terima prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Perumahan dalam wilayah Kota Jambi dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota Jambi.
 - Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang rumah sehat melalui penyuluhan-penyuluhan dikelurahan dalam kota jambi.
 - Penyuluhan rumah sehat serta inventarisasi rumah tidak layak huni.
3. Pengendalian pemanfaatan ruang kota

Untuk menciptakan kawasan yang tertata, tertib dan teratur maka diperlukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan membentuk tim pengawasan yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan dalam kota Jambi serta pengendalian terhadap perizinan yang dikeluarkan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang melalui aplikasi Simreda (Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah) dan yang akan menjadi prioritas utama harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang signifikan, terukur dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat;
2. Mekanisme dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Sesuai dan sejalan dengan Visi, Misi, Program Daerah yang telah dituangkan dalam RPJM Kota Jambi Tahun 2018-2023.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Program Peningkatan, Pemeliharaan dan Penataan Utilitas Umum				
	Lampu Jalan	Kecamatan Alam Barajo	Pemasangan Lampu Jalan	145 <u>Unit</u>	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Danau Sipin	Pemasangan Lampu Jalan	16 Unit	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Pelayangan	Pemasangan Lampu Jalan	24 Unit	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Telanaipura	Pemasangan Lampu Jalan	110 Unit	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Jelutung	Pemasangan Lampu Jalan	105 Unit	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Kota Baru	Pemasangan Lampu Jalan	76 Unit	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Paalmerah	Pemasangan Lampu Jalan dengan Tiang	32 Unit	Usulan Aspirasi/Pokir
	Pagar TPU	Kecamatan Telanai	Pembuatan Pagar	5 Pemakaman Umum	Usulan Aspirasi/Pokir



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kecamatan Kota Baru	Pembuatan Pagar	1 Pemakaman Umum	Usulan Aspirasi/Pokir
	Bedah Rumah	Kecamatan Telanai	Bedah Rumah	7 Rumah	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Kota Baru	Bedah Rumah	3 Rumah	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Pelayangan	Bedah Rumah	3 Rumah	Usulan Aspirasi/Pokir
	Pembangunan wc/septitank	Kecamatan Telanai	Pembangunan wc/Septitank	6 Unit	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Pelayangan	Pembangunan wc/Septitank	2 Unit	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Alam Barajo	Pembangunan wc/Septitank	1 Unit	Usulan Aspirasi/Pokir
	Pembuatan Sumur	Kecamatan Alam Barajo	Pembuatan Sumur	5 Sumur	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Telanai	Pembuatan Sumur	2 Sumur	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Danau Sipin	Pembuatan Sumur	2 Sumur	Usulan Aspirasi/Pokir
		Kecamatan Pelayangan	Pemasangan Sumur	5 Sumur	Usulan Aspirasi/Pokir



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan antara lain:

3.1.1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Kebijakan Nasional perumahan dan kawasan permukiman yang termaktub dalam pasal-pasal berikut:

- Bab II.2 Huruf D 5: Memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat untuk mewujudkan Kota tanpa permukiman kumuh.
 - Bab IV.1.5. Butir 19: Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang terjangkau daya beli masyarakat
- Arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang dimatkan dalam Undang- Undang nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:
- 1) Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana, sarana, permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, efisien.
 - 2) Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan.
 - 3) Pembangunan Perumahan beserta prasarana sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup

3.1.2. Undang - Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan perumahan tercantum pada pasal 129 huruf a yaitu: Dalam penyelenggaraan



perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai pasal 15 adalah sebagai berikut:

- 1) menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
- 2) menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 3) menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- 4) menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- 5) melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan
- 6) industri bahan bangunan yang mengutamakan sumberdaya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
- 7) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- 8) melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;
- 9) melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- 10) melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
- 11) melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- 12) melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- 13) mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat



kabupaten/kota;

- 14) mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- 15) memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
- 16) menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
- 17) memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

3.1.3. Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tahun 2015 tentang Rencana Strategi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019

Pada Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tahun 2015, tercantum visi, misi, arah kebijakan dan pengembangan kebijakan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Badan Perumahan sebagai berikut:

- Visi : Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.
- Misi yang berkaitan dengan Bidang Perumahan Rakyat : Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua".

Sasaran Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat :

- 1) Meningkatnya Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data dan Informasi serta Evaluasi Kinerja Pengembangan perumahan
- 2) Terbangunnya 550.000 unit sarusun (satuan rumah susun) yang dilengkapi PSU pendukungnya.
- 3) Terbangunnya 50.000 unit rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara.
- 4) Terwujudnya keswadayaan untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 1.750.000 Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- 5) Pembinaan umum dan pengembangan rumah umum dan komersial:
 - a. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan rumah umum dan komersial



- b. Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan Rusun melalui penyertaan modal negara untuk Perum Perumnas
- c. Terfasilitasinya Pengelolaan Rumah Susun Sewa bagi MBR yang dilaksanakan oleh BUMN.

3.1.4. Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi pasal 4 disebutkan bahwa fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, permukiman dan utilitas perkotaan;
- b. Penyelenggaraan urusan perumahan, permukiman dan utilitas perkotaan;
- c. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi perumahan, kawasan permukiman dan utilitas perkotaan;
- d. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan pihak-pihak lain;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran DPRKP	Indikator Sasaran DPRKP
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan	Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur dan Utilitas	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni.	Persentase Perumahan dan Permukiman Tidak Layak Huni yang ditangani



3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

3.2.1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan.”

3.2.2. Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran Dinas Perumahan dalam mewujudkan tujuan organisasi melalui penyusunan Rencana Kerja OPD adalah :

“Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni.”

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan dijelaskan pada Tabel 3.2 dan 3.3 berikut ini

Tabel 3.2
Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Tujuan DPRKP	Indikator Tujuan DPRKP	Target Kinerja Tujuan DPRKP Tahun 2024
1	2	3	4
1	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	7,7

Tabel 3.3
Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Sasaran DPRKP	Indikator Sasaran DPRKP	Target Kinerja Sasaran DPRKP Tahun 2024
1	2	3	4
1	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni.	Persentase Perumahan dan Permukiman Tidak Layak Huni yang ditangani	77,73%



Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja Utama DPRKP	Target Indikator Kinerja Utama DPRKP Tahun 2024
1	2	3
1	Meningkatkan Layanan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan	82,71%



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI

Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- Tujuan yang dikehendaki;
- Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi Tahun 2023 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;
- Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah– masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya



- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pengadaan Aset Tetap Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Dengan Kegiatan Sebagai berikut :

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- b. Identifikasi Lahan - lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan

2. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

3. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan



Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.

2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
- b. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- b. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh.

4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
- b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan



5. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

Untuk keterangan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dapat dijelaskan dalam pada tabel 4.1 berikut ini



Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi

No	Kode					Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
											Tahun 2022		Tahun 2023	
											Target Kinerja	RP	Target Kinerja	RP
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
						DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	04					Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	Meningkatkan Layanan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	Persentase Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					
1	04	1							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	7.377.115.536	100%	Rp8.229.238.632
1	04	1	2.01						<u>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Peningkatan Nilai AKIP	80	118.183.810	80	Rp131.835.101
1	04	1	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	80.071.410	7 dokumen	Rp89.320.377



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

No	Kode					Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
											Tahun 2022		Tahun 2023	
											Target Kinerja	RP	Target Kinerja	RP
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04	1	2.01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen dan 1 website	38.112.400	1 dokumen dan 1 website	Rp42.514.724
1	04	1	2.02						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan	100%	5.140.151.188	100%	Rp5.733.884.812
1	04	1	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	4.720.926.688	50 Orang	Rp5.266.236.118
1	04	1	2.02	07					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	41.009.700	12 dokumen	Rp45.746.689
1	04	1	2.05						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	90.335.000	100%	Rp100.769.504
1	04	1	2.05	02					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	129 stel	80.335.000	129 stel	Rp89.614.414
1	04	1	2.05	11					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek dan Perjalanan dinas dalam daerah	2 orang/kali	10.000.000	2 orang/kali	Rp11.155.090



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

No	Kode					Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
											Tahun 2022		Tahun 2023	
											Target Kinerja	RP	Target Kinerja	RP
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04	1	2.06						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	416.818.901	100%	Rp464.965.227
1	04	1	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi	Lampu Hemat Energy = 104 buah	9.686.683	Lampu Hemat Energy = 104 buah	Rp10.805.582
1	04	1	2.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket ATK dan 1 paket Alat Kebersihan	193.335.765	1 paket ATK dan 1 paket Alat Kebersihan	Rp215.667.782
1	04	1	2.06	05					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	cetak map dinas = 445 buah	37.878.753	cetak map dinas = 445 buah	Rp42.254.089
1	04	1	2.06	08					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	300 bungkus	5.775.000	300 bungkus	Rp6.442.064
1	04	1	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	61 kali	170.142.700	61 kali	Rp189.795.710
1	04	1	2.07						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	798.528.800	100%	Rp890.766.048
1	04	1	2.07	02					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Mobil Jenazah	1 unit	630.000.000	1 unit	Rp702.770.658



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

No	Kode					Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
											Tahun 2022		Tahun 2023	
											Target Kinerja	RP	Target Kinerja	RP
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04	1	2.07	06					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	22 unit	168.528.800	22 unit	Rp187.995.390
1	04	1	2.08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	261.252.200	100%	Rp291.429.175
1	04	1	2.08	01					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	318 Lembar	43.317.600	318 Lembar	Rp48.321.172
1	04	1	2.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Sumber Daya Air Jumlah Jasa Listrik	Rekening Listrik 43.886 KWH, Air 1.224 Kubik, Internet 150 MBPS	217.934.600	Rekening Listrik 43.886 KWH, Air 1.224 Kubik, Internet 150 MBPS	Rp243.108.004
1	04	1	2.09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	551.845.637	100%	Rp615.588.764



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

No	Kode					Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
											Tahun 2022		Tahun 2023	
											Target Kinerja	RP	Target Kinerja	RP
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04	1	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK/KIR, Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	29 unit, 33 unit	432.874.000	29 unit, 33 unit	Rp482.874.835
1	04	1	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit AC, 20 unit Laptop dan 19 unit Printer	64.031.000	50 unit AC, 20 unit Laptop dan 19 unit Printer	Rp71.427.156
1	04	1	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan yang dipelihara	1 Rusun	54.940.637	1 Rusun	Rp61.286.774
1	04	02							Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR	60%	1.071.002.669	60%	Rp1.178.102.936
1	04	02	2.01						Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen data dan informasi Lokasi Rawan Bencana	1 Dokumen	533.521.282	1 Dokumen	Rp586.873.410



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

No	Kode					Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
											Tahun 2022		Tahun 2023	
											Target Kinerja	RP	Target Kinerja	RP
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04	02	2.01	01					Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana	1 Dokumen	255.908.002	1 Dokumen	Rp281.498.802
1	04	02	2.01	02					Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen data Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	277.613.280	1 Dokumen	Rp305.374.608
1	04	02	2.05						Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah pengelola rumah susun yang difasilitasi	1 Rusun	157.745.058	1 Rusun	Rp173.519.564
1	04	02	2.05	02					Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah rusun yang termanfaatkan	1 Rusun	157.745.058	1 Rusun	Rp173.519.564
1	04	02	2.06						Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	379.736.329	100%	Rp417.709.962



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

No	Kode					Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
											Tahun 2022		Tahun 2023	
											Target Kinerja	RP	Target Kinerja	RP
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04	02	2.06	01					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	50 Lokasi Perumahan	68.006.039	50 Lokasi Perumahan	Rp74.806.643
1	04	02	2.06	03					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Perumahan	50 Kali	311.730.290	50 Kali	Rp342.903.319
1	04	03							Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	66,12%	2.624.030.980	75,44%	Rp2.686.183.808
1	04	03	2.01						Penerbitan Izin dan Pembangunan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan permukiman yang memiliki izin	100%	557.048.800	100%	Rp570.243.064



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

No	Kode					Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
											Tahun 2022		Tahun 2023	
											Target Kinerja	RP	Target Kinerja	RP
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04	03	2.01	01					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Rekomendasi Permohonan Teknis dan SKRK yang Masuk	350 Rekomendasi	104.151.800	350 Rekomendasi	Rp106.618.741
1	04	03	2.01	02					Penyusunan dan/atau Review serta legalitasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan permukiman	3 dokumen	433.564.000	3 dokumen	Rp443.833.402
1	04	03	2.01	03					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	2 Kali	19.333.000	2 Kali	Rp19.790.922
1	04	03	2.02						Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertata dengan luas dibawah 10 ha	100%	134.140.130	100%	Rp137.317.375



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

No	Kode					Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
											Tahun 2022		Tahun 2023	
											Target Kinerja	RP	Target Kinerja	RP
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04	03	2.02	04					Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	2 Kali	30.909.680	2 Kali	Rp31.641.807
1	04	03	2.02	05					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	6 Kali	50.787.800	6 Kali	Rp51.990.760
1	04	03	2.02	08					Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	jumlah review kebijakan PKP yang disusun	2 Perda	52.442.650	2 Perda	Rp53.684.807
1	04	03	2.03						Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase penurunan rumah tidak layak huni	32,09%	1.932.842.050	33,97%	Rp1.978.623.369
1	04	03	2.03	02					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	24 Unit	1.932.842.050	24 Unit	Rp1.978.623.369



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

No	Kode					Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
											Tahun 2022		Tahun 2023	
											Target Kinerja	RP	Target Kinerja	RP
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04	05							Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan perumahan yang dilayani utilitas umum	80%	26.431.830.096	80%	Rp29.896.126.967
1	04	05	2.01						Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase perumahan yang dilayani utilitas umum	80%	26.431.830.096	80%	Rp29.896.126.967
1	04	05	2.01	01					Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	2 Dokumen	255.072.310	2 Dokumen	Rp288.503.450
1	04	05	2.01	02					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU Perumahan	21.993 unit LPJU, 10 Lokasi Perumahan	24.694.626.836	21.993 unit LPJU, 10 Lokasi Perumahan	Rp27.931.236.566
1	04	05	2.01	03					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	50 kali	1.482.130.950	50 kali	Rp1.676.386.951



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

No	Kode					Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
											Tahun 2022		Tahun 2023	
											Target Kinerja	RP	Target Kinerja	RP
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04	06							PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	10 orang/Badan Usaha	22.619.495	10 orang/ Badan Usaha	Rp25.311.418
1	04	06	2.01						Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	10 orang/Badan Usaha	22.619.495	10 orang/ Badan Usaha	Rp25.311.418



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

No	Kode					Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
											Tahun 2022		Tahun 2023	
											Target Kinerja	RP	Target Kinerja	RP
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04	06	2.01	01					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Koordinasi dan sosialisasi dan	3 kegiatan koordinasi dan Sosialisasi	22.619.495	3 kegiatan koordinasi dan Sosialisasi	Rp25.311.418



BAB V

PENUTUP

Salah satu upaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada Masyarakat pada sektor perumahan rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi senantiasa berusaha untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dan RKPD Kota Jambi. Namun kami menyadari bahwa program dan kegiatan yang sudah kami tuangkan dalam Rencana Kerja sebagai rujukan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum maksimal .

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Berdasarkan Evaluasi yang di laksanakan ada beberapa kegiatan yang belum dapat di laksanakan , hal ini disebabkan karena masih terbatasnya Anggaran yang tersedia .
- Ada beberapa kegiatan yang progressnya belum maksimal, hal ini disebabkan karena sarana penunjang perlu ditingkatkan.
- Ada beberapa kegiatan yang progressnya telah maksimal.

Untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan sektor perumahan kepada masyarakat maka diharapkan ada peningkatan anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, sehingga capaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara maksimal dan komprehensif.

Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang transparan dan akuntabel serta komprehensif maka pembangunan perumahan dan prasarana , sarana dan utilitas pendukung dapat berjalan secara baik dan optimal sehingga semua pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya dapat mendukung visi, misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi.

Ada beberapa hal yang secara terus-menerus perlu mendapat perhatian sehingga kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) secara bertahap dapat dipenuhi. Sebagai upaya untuk melakukan percepatan pemenuhan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni harus dilaksanakan melalui berbagai sumber dana, diantaranya adalah dana APBD, APBN serta peran aktif seluruh masyarakat yang di usulkan secara hirarkhi melalui Simreda milik Pemerintah Kota Jambi.

Rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini kami buat sesuai dengan ketentuan-ketentuan / aturan-aturan yang lebih berlaku dan kebijakan Kepala



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

daerah dan Dewan yang terhormat. Hal ini perlu dilaksanakan dalam rangka untuk melakukan penyesuaian penyesuaian dengan kebutuhan yang diperlukan.

Demikian untuk di maklumi terima kasih.

Jambi, Mei 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA JAMBI

MAHRUZAR, ST

Pembina Tk.I

0NIP. 19780127 200501 1 004



No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program (out comes) / Kegiatan (out put)	2024	
			Target Kinerja	Pagu (Rp)
1	1.04.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	17.830.431.482
	1.04.01.2.01 <u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	Peningkatan Nilai AKIP	76	124.839.264
	1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	78.266.705
	1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	46.572.559
	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan	100%	5.620.731.658
	1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	5.174.430.616



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2500 Dokumen	405.672.080
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	40.628.962
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	84.230.700
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	81 Paket	69.230.700
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	15.000.000
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	486.555.931
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.793.034



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.347.048
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.638.425
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	13.049.438
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	229.727.988
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	10.816.831.998
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 unit kursi chitos rapat dan 1 set meja rapat	50.000.000
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	56.831.998
1.04.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit gorden ruang rapat bawah	10.000.000



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

1.04.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit gedung, perencanaan gedung 700juta, pembangunan gedung 10Milyar	10.700.000.000
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	209.411.840
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	2.750 Surat	46.892.560
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	162.519.280
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	487.830.090
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	416.755.680
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 unit	71.074.410



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

2	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR	79,67%	726.243.299
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Progrma Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100,00%	100.000.000
	1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	100.000.000
	1.04.02.2.03	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100,00%	170.000.000
	1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	170.000.000
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase tersusunnya kesepakatan komitmen dengan pengembang/pelaku pembangunan dan pengembangan perumahan	100,00%	456.243.299



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	20 Dokumen	96.243.299
	1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5 Laporan	360.000.000
3	Program Kawasan Permukiman		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	35,95%	8.717.881.474
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	100,00%	802.530.910
	1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	3 Dokumen	762.971.460



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Laporan	39.559.450
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	76,64%	73.265.030
	1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	73.265.030
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	35,95%	7.842.085.534
	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	150 unit	7.842.085.534
4	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	93,50%	29.979.593.927
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum.	93,50%	29.979.593.927



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

	1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	2 Dokumen	279.165.165
	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Pemeliharaan LPJU	1500 Pemasangan Lampu PJU, 1500 Pemeliharaan PJU, 98 Pemeliharaan Makam, 15 Pembangunan Makam dan 2 Lokasi Jalan Lingkungan Perumahan	29.370.897.950
	1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	10 Laporan	308.016.208
	1.04.05.2.01.05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Dokumen	21.514.604
4	1.04.06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	10%	25.000.000



DPRKP/KOTA JAMBI/2024

1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	10%	25.000.000
1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	25.000.000
Total				57.279.150.182

Jambi, Mei 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA JAMBI



MAHRUZAR, ST
Pembina Tk.I

NIP. 19780127 200501 1 004